

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pelaksanaan alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi untuk kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041. Alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan mengutamakan RTRW Kabupaten Klaten. Lokasi lahan untuk perumahan yang sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten Klaten akan tetapi masuk dalam penetapan peta LSD, dapat dikeluarkan dari penetapan peta LSD dengan memperoleh rekomendasi perubahan penggunaan tanah oleh Menteri ATR/BPN cq Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR).

#### **B. SARAN**

Pembuatan peraturan memerlukan koordinasi yang komprehensif yaitu koordinasi yang menyeluruh, lengkap, dan mencakup berbagai aspek. Penetapan peta LSD oleh Kementerian ATR/BPN hendaknya bersesuaian dengan RTRW Kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin Dan H. Zainalsi Akin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fauziyah, Muh Iman, 2020, *Perubahan Alih Fungsi Lahan*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Kusnadi Hardjosoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Masri Singarimbun, 1981, *Metode Penelitian Hukum dan Survei*, LP3 ES.
- Muchsin Dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mustofa, Suratman, 2013, *Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sinaga, Sahat HMT, 2007, *Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak*, Penerbit Pustaka Sutra, Bandung.
- Sitorus, Santun R.P, 2019, *Penataan Ruang*, Penerbit IPB Press, Bogor.
- Wantjik Saleh K., 1985, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Widodo, 2004, *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*, Jakarta.
- Yunus Wahid, 2016, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Penerbit Kencana, Jakarta.

### Jurnal

- Niken Sari, Budhianti, 2023, “Lahan Sawah Dilindungi Dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomr 59 Tahun 2019”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.5 No. 4, Universitas Trisakti.
- Ferisa Nurfauziyah, 2022, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Para Pelaku Bisnis Perumahan”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 11, Universitas Indonesia.
- Sultan Ali Sadewa dan Harsanto Nursadi, 2024, “Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan (Studi Kasus di Kelurahan Merjolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang)”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6 No. 4, Universitas Ekasakti.

### Web

- Achmad Hussein Syauqi, Pemdes di Klaten Keluhkan Lahan Sawah Dilindungi: Investor Tak Jadi Masuk, <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6191630/pemdes-di-klaten-keluhkan-lahan-sawah-dilindungi-investor-tak-jadi-masuk> diakses 15 Oktober 2024

## Skripsi

- Adriel Pandu Bagaskara C., 2019, *Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan yang Dilakukan Oleh Pengembang Properti di Kabupaten Pati Jawa Tengah*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Melano Seran Sadipun R., 2021, *Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian Untuk Tempat Usaha Kafe di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Vanessa Brigitta S., 2024, *Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian Untuk Rumah dan Toko di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1380.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah yang Dilindungi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 979. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor: 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tahun 2021 Tentang Penetapan Peta LSD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28.  
Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041. Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10. Sekretariat Daerah. Klaten.
- Petunjuk Teknis Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah Yang Dilindungi